

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Profil Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 dapat diselesaikan dengan baik. Buku Profil ini menggambarkan implementasi berbagai program dan kegiatan Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2013.

Keberhasilan dalam penyusunan buku profil ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan serta partisipasi semua pihak, Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kami berharap semoga buku profil Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Purbalingga, Juli 2013
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga

Drs. NUR HAMAM, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620614 198503 1 009

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang merupakan pembangunan di segala bidang, maka pembangunan di bidang politik adalah bagian yang sangat penting dan strategis.

Disebut penting karena stabilitas politik di wilayah/kabupaten Purbalingga yang mantap akan sangat mendukung stabilitas politik baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Pusat. Disebut strategis karena stabilitas politik di Kabupaten Purbalingga yang mantap merupakan syarat yang penting dalam mendukung pembangunan social dan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah telah diletakkan kewenangan kepada tatanan pemerintah baik pada tatanan pusat, provinsi maupun kabupaten, termasuk kewenangan di politik, maksudnya bahwa pada saat ini kewenangan di bidang politik telah menjadi tanggung jawab penuh Daerah, khususnya Daerah Kabupaten Purbalingga.

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor : 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga dan keberadaan Kantor Kesbangpol diatur dalam BAB VIII pasal 23, 24, 25, dan pasal 26.

Dalam melaksanakan kewenangan di bidang Kesbangpol, maka perlu peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang bertugas di Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, peluang, dan kendala yang ada, maka disusunlah Buku Profil.

Buku Profil kerja sebagai bagian dari system akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah untuk memberikan arah, pedoman, visi dan misi Kantor Kesbangpol Tahun 2013 dengan menyesuaikan issue-issue politik yang berkembang di Kabupaten Purbalingga.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Profil Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 adalah sebagai gambaran profil Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga Tahun 2013.

Adapun Tujuan penyusunan Buku Profil Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 antara lain :

1. Menegaskan tugas pokok dan fungsi, visi dan misi Kantor Kesbangpol.
2. Menggambarkan umum dan SDM Kantor Kesbangpol.

3. Membantu para pihak terkait dan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Kantor Kesbangpol.
4. Bahan pengambilan keputusan dan kebijakan oleh Bupati Purbalingga.

II. GAMBARAN UMUM SKPD

1. Dasar Hukum

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor : 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga nomor 19 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kantor Kesbangpol diatur dalam BAB VIII pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, kemasyarakatan, dan politik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Kantor Kesbangpol mempunyai fungsi :

- Penetapan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- Pelaksanaan perumusan kebijakan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pelaksanaan penguatan nilai-nilai kebangsaan;
- Fasilitasi dan pengelolaan dinamika politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- Mengadakan fasilitasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Kondisi SDM

Jumlah pegawai/PNS pada Kantor Kesbangpol Awal Tahun 2013 terinci sebagai berikut:

1) Drs. NUR HAMAM, M.Si

NIP : 19620614 198503 1 009

Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 14 Juni 1962

Jabatan : Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Purbalingga

Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)

Pendidikan : S2

2) EDY SETYAWAN, BA

NIP : 19571214 198503 1 009
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 14 Desember 1957
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pendidikan : Sarjana Muda

3) DWI ANANG PRIO SUHARTONO

NIP : 19640509 198510 1 001,
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga 9 Mei 1964
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Pendidikan : SMA

4) HALIS SUMINI

NIP : 19580414 198003 2 007
Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 14 April 1958
Jabatan : JFU Pembantu Bendahara Pengeluaran di
Sub. Bagian Tata Usaha
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Pendidikan : SMEA

5) SUYATNO

NIP : 19611215 198508 1 001
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap 15 Desember 1961
Jabatan : JFU pengumpul dan pengolah data pada seksi
Bina Sospol
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Pendidikan : SMA

6) LASIMIN, S.Sos

NIP : 19650715 198703 1 016
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 15 Juli 1965
Jabatan : JFU Bendahara pengeluaran pada Sub.bagian
Tata Usaha
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Pendidikan : SMEA

7) SAYIDI

NIP : 19650710 199003 1 009
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 10 Juli 1965
Jabatan : JFU pengumpul dan pengolah data pada
Seksi Bina Kesbang
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Pendidikan : SMA

8) AGUS SURIPTO

NIP : 19650820 199003 1 009
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 20 Agustus 1965
Jabatan : JFU Staf administrasi keuangan pada Seksi
Bina Kesbang
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Pendidikan : SMEA

9) ESTI RIYANTO

NIP : 19590408 198607 1 002
Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 8 April 1959
Jabatan : JFU penatalaksanaan kepegawaian pada
Sub.bag. Tata Usaha
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Pendidikan : SMA

10) MULYONO

NIP : 19660711 199103 1 006
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 11 Juli 1966
Jabatan : JFU pengurus barang pada sub.bag Tata
Usaha
Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c)
Pendidikan : SMA

11) DWI KUSWORO

NIP : 19580815 199102 1 002
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 15 Agustus 1958
Jabatan : JFU agendaris pada Sub.bag Tata Usaha
Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c)
Pendidikan : ST (SLTP)

12)DHANI INDRIYANI, A.Md

NIP : 19821208 201012 2 023
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 8 Desember 1982
Jabatan : JFU pembantu PPK (Pembantu Pejabat
Penatausahaan Keuangan) pada Sub.bag
Tata Usaha
Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c)
Pendidikan : D.3 Akuntansi

13)LASTONO

NIP : 19651110 198611 1 002
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 10 Nopember 1965
Jabatan : JFU Staf Administrasi Keuangan pada Seksi
Bina Sospol
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
Pendidikan : SMA

14)HANDAYONO

NIP : 19760305 200604 1 020
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 5 Maret 1976
Jabatan : JFU caraka / pengantar surat pada Sub.bag
Tata Usaha
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
Pendidikan : MAN (SLTA)

15)ASEP SUDARYO

NIP : 19750318 200701 1 008
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 18 Maret 1975
Jabatan : JFU penjaga malam pada Sub.bag Tata
Usaha
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
Pendidikan : SMA

16)SRI DEWI

NIP : 19840701 200701 2 002
Tempat/Tanggal Lahir : Blangkejeren (Aceh), 1 Juli 1984

Jabatan : JFU pengumpul dan pengolah data pada
Seksi Bina Sospol
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
Pendidikan : SMA

17) TRI SUSMIYATI HANDAYANI

NIP : 19740906 200801 2 011
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 6 September 1974
Jabatan : JFU Staf Administrasi keuangan pada Sub.bag
Tata Usaha
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda (II/b)
Pendidikan : SMEA

18) SAYIDI

NIP : 19660614 200701 1 014
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 14 Juni 1966
Jabatan : JFU Tenaga Kebersihan pada Sub.bag Tata
Usaha
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda (II/a)
Pendidikan : SMA

19) IMAM BUDI SANTOSA

NIP : 19750813 200901 1 009
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 13 Agustus 1975
Jabatan : JFU pengemudi (sopir) pada sub.bag Tata
Usaha
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda (II/b)
Pendidikan : SMA

4. Data-data Kinerja

Pada Kantor Kesbangpol Tahun 2013 (awal tahun) mendapat alokasi dana sebesar Rp 2.320.645.000,- (Dua milyar tiga ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Belanja tidak langsung Rp 997.849.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dan belanja langsung Rp 1.322.796.000,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Adapun penjelasan sebagai berikut :

Belanja tidak langsung untuk gaji dan tamsil bagi PNS 20 (dua puluh) orang. Sedangkan belanja langsung di tahun 2013 ada 4 (empat) program, 18 (delapan belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Penyediaan bahan dan jasa perkantoran dengan alokasi dana Rp 118.630.000,- untuk mendukung administrasi kantor bagi 20 orang PNS.
- 2) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, dengan alokasi dana Rp 56.722.000,- dengan sasaran tercukupinya berbagai perjalanan dinas baik dalam dan luar daerah.
- 3) Kegiatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, dengan alokasi dana Rp 162.745.000,- dengan sasaran terpeliharanya sarana dan prasarana antara lain 1 gedung, 11 kendaraan, 5 komputer.
- 4) Pendidikan dan pelatihan pegawai dengan alokasi dana Rp 8.000.000,- dengan sasaran peningkatan SDM PNS, (20 orang).

B. Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat terdiri 5 (lima) kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pengamanan Tertutup Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Tamu VVIP, dengan dana Rp 13.902.000. dengan sasaran peningkatan kualitas keamanan di hari raya Lebaran, Natal, dan Tahun Baru serta Tamu VVIP, dengan melibatkan 14 personil PamTup.
- 2) Kegiatan Pemberdayaan Badan Koordinasi dan Informasi dengan dana Rp 73.011.000,- dengan sasaran teratasinya AGHT melalui upaya deteksi dini dan cegah dini dengan memanfaatkan informasi yang akurat. Personil yang terlibat sebanyak 22 orang Kominda.
- 3) Kegiatan Keamanan Terpadu dengan dana Rp 352.800.000,- dengan sasaran teratasinya berbagai gangguan keamanan di Kab. Purbalingga melalui peningkatan koordinasi antar Muspida 6 (enam) institusi.
- 4) Kegiatan Desk Pilgub Jateng Tahun 2013 dengan dana sebesar Rp 153.655.000,- dengan sasaran terwujudnya peningkatan kualitas keamanan pra, pada saat dan pasca Pilgub Jateng, dengan melibatkan 33 orang personil Desk.
- 5) Kegiatan Desk Pilkades Tahun 2013 dengan dana Rp 157.555.000,- dengan sasaran terwujudnya peningkatan kualitas keamanan pra, pada saat, dan pasca Pilkades, dengan melibatkan 32 orang anggota Desk Pilkades.

- C. Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik terdiri 6 (enam) kegiatan yaitu :
- 1) Kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan dana Rp 3.450.000,- dengan sasaran terdukungnya kegiatan Parpol dan terciptanya tertib administrasi keuangan bagi 9 (sembilan) Parpol yang menduduki kursi DPRD Purbalingga.
 - 2) Kegiatan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) dengan dana Rp 50.375.000,- dengan sasaran terakomodasinya penyelesaian sengketa pendirian rumah ibadah dan terwujudnya program kerja FKUB, dengan peserta pembinaan 350 orang.
 - 3) Kegiatan Fasilitasi kegiatan ormas, LSM, dan Pemantauan organisasi masyarakat, dengan dana Rp 14.684.000,- dengan sasaran terdukungnya kegiatan ormas, dan terserapnya aspirasi masyarakat, dan peserta pembinaan 45 orang pengurus ormas/LSM.
 - 4) Kegiatan fasilitasi kegiatan orpol dan penyusunan data serta peta parpol, dengan dana Rp 4.828.000,- dengan sasaran terdukungnya kegiatan Parpol yang ada di Kab. Purbalingga, dengan peserta Rakor 40 orang.
 - 5) Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan dana Rp 7.455.000,- dengan sasaran teratasinya berbagai gangguan keamanan melalui deteksi dini dan cegah dini berbagai gangguan keamanan, dengan peserta sarasehan 60 orang.
 - 6) Fasilitasi program kerjasama Pemda dengan Ormas/LSM dan lembaga nirlaba lainnya dengan dana Rp 54.534.000,- dengan sasaran terdukungnya kegiatan ormas dan LNL yang difasilitasi 13 ormas/LSM.
- D. Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:
- 1) Kegiatan Sarasehan Pembauran Etnis dengan dana Rp 3.910.000,- dengan sasaran terwujudnya peningkatan persatuan dan kesatuan antar etnis yang ada di Kab. Purbalingga dengan peserta sarasehan 50 orang.
 - 2) Kegiatan Pembekalan Wasbang dengan dana Rp 72.305.000,- dengan sasaran terwujudnya peningkatan wasbang bagi peserta kegiatan (1.020 siswa SLTA).
 - 3) Kegiatan Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa dengan dana Rp 14.235.000,- dengan sasaran terwujudnya peningkatan wasbang bagi peserta (150 orang Toga, Toma).

III. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAYANAN

I. Bidang SDM

A. Pembinaan / Diklat

Pembinaan dan diklat di Kantor Kesbangpol, dengan kebijakan antara lain menyediakan dana pada DPA setiap Tahun Anggaran, dengan alokasi sebesar Rp 8.000.000,- atau Rp 10.000.000,-

Dana sebesar itu penggunaannya menerapkan prinsip efisiensi dan mengacu pada petunjuk/kebijakan dari Sekretaris Daerah yaitu sesuai kebutuhan Satker dan kompetensi yang dibutuhkan. Kebiasaan yang terjadi meskipun dananya relative terbatas, tetapi pada akhir tahun terdapat sisa anggaran. Adapun data diklat PNS pada Kantor Kesbangpol sebagai terurai di bawah ini.

Data Diklat PNS pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga

No.	Nama PNS	Diklat
1.	Drs. Nur Hamam, M.Si	1. Sepada 2. Suspimpemdagri 3. Adumla 4. Organisasi dan Methode 5. Budaya Kerja 6. Diklat Pim Tingkat III 7. Intelejen Tingkat Dasar
2.	Edy Setyawan, BA	1. Adum 2. Adumla 3. Diklat Dasar Intelejen
3.	Dwi Anang Prio Suhartono	1. Adum 2. Diklat Dasar Satpol PP
4.	Halis Sumini	1. Adum
5.	Suyatno	1. Adum
6.	Lasimin, S.Sos.	1. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
7.	Sayidi (Kesbang)	1. Manajemen Penanggulangan Bencana 2. SAR Air
8.	Agus Suripto	1. Bendahara Daerah 2. Adum 3. Intelejen

No.	Nama PNS	Diklat
9.	Esti Riyanto	1. Manajemen Penanggulangan Bencana 2. Bela Negara
10.	Mulyono	1. Diklat
11.	Dwi Kusworo	Nihil
12.	Dhani Indriyani, A.Md.	1. Analisis Jabatan
13.	Lastono	1. Diklat Santel 2. Diklat Dasar Intelejen 3. Diklat Keormasan
14.	Handayono	1. Manajemen Penanggulangan Bencana 2. Danton Satlinmas
15.	Sri Dewi	Nihil
16.	Tri Susmiyati Handayani	1. Diklat MC
17.	Sayidi (TU)	Nihil
18.	Asep Sudaryo	Nihil
19.	Imam Budi S	Nihil

Dalam rangka lebih meningkatkan disiplin bagi PNS di lingkup Kantor Kesbangpol Kakan memerintahkan untuk selalu mengikuti upacara pengibaran bendera luar biasa setiap hari Senin atau hari-hari besar untuk seluruh PNS. Selain itu, apabila akan melaksanakan kegiatan, maka personil yang terlibat dalam kepanitian maupun personil pendukung selalui diberi pengarahan dan pembinaan agar program dan kegiatan berjalan sesuai rencana serta hasil yang maksimal.

B. Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kegiatan pada Kantor Kesbangpol biasa dilaksanakan sesuai kegiatan dilaksanakan, dengan harapan permasalahan yang ada baik mengenai personil, administratif, dan keuangan dapat segera diketahui dan ditangani secara tuntas.

Evaluasi dilaksanakan dengan mengacu perencanaan dan kebijakan dan telah “disepakati” dengan tujuan hasil kegiatan maksimal dan permasalahan secepatnya bisa diatasi.

Evaluasi juga dapat dilaksanakan pada saat kegiatan sedang berjalan/berlangsung, apabila ternyata dalam perjalanan terdapat kendala baik personil, administratif, keuangan maupun peralatan pada kegiatan tersebut dengan harapan kendala dan permasalahan bisa diatasi dengan cepat dan tepat (sifat evaluasi incidental).

Evaluasi kegiatan rutin dilakukan pada awal bulan, akhir bulan, awal dan akhir kegiatan, tri bulanan, serta awal tahun dan akhir tahun.

C. Penerapan Sanksi dan Penghargaan

Menjelaskan tentang sanksi dan penghargaan bagi PNS, khususnya bagi PNS di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga secara legal formal Kepala Kantor belum mengatur secara resmi/tertulis dalam bentuk Surat Keputusan, namun demikian bukan berarti sanksi dan penghargaan belum/tidak ada di Kantor Kesbangpol.

Contoh kasus sederhana yaitu apabila PNS “sering” datang terlambat maka PNS tersebut akan dipanggil, minimal ditegur, maksimal dibina, dimotivasi agar di masa datang lebih baik lagi (jarang terlambat).

Dalam menerapkan sanksi posisi Kepala Kantor dengan para stafnya adalah sebagai “teman/sahabat” agar komunikasi dapat lebih efektif.

Dalam menerapkan sanksi Kepala Kantor lebih menekankan unsur memotivasi dan pembinaan bagi PNS yang melanggar ketentuan/aturan yang berlaku.

Bagi PNS yang kinerjanya belum optimal, maka PNS tersebut akan kena sanksi dan dimotivasi agar segera menyelesaikan tugasnya. Sedangkan penghargaan bagi PNS yang berprestasi yaitu melalui ucapan terima kasih atas kinerja yang baik. Hal itu biasa disampaikan seusai kegiatan lewat staff meeting.

II. Bidang/Manajemen Pelayanan

A. Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya kondisi politik yang lebih demokratis, kondisi masyarakat yang aman, dan damai dalam rangka mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Penjelasan singkat tentang visi tersebut di atas yaitu kondisi politik yang lebih demokratis yaitu bahwa kondisi politik di Kab. Purbalingga khususnya legislatif idealnya dapat berperan dan berfungsi secara optimal (Supra Struktur Politik). Sedangkan di lingkup Partai Politik baik Parpol Parlemen dan Parpol Non Parlemen, agar dapat berperan dan berfungsi dengan baik (kinerja meningkat) maka harus difasilitasi oleh Pemda (Kesbangpol).

Kondisi politik yang mencerminkan kehendak rakyat sebagai mitra eksekutif dan selalu bersinergi dengan mendukung program pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan di Kabupaten Purbalingga. Kondisi masyarakat yang aman diartikan sebagai tidak ada gangguan, ancaman, tidak ada pencurian dan tindak kriminal yang lain.

Damai diartikan sebagai situasi masyarakat yang rukun (guyub), saling kenal mengenal dan komunikasi yang baik antar warga, saling tolong-menolong. Dengan situasi yang kondusif tersebut di atas diharapkan akan mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Misi

- a. Terwujudnya kemantapan wawasan kebangsaan, ideologi, ketahanan bangsa, dan kesadaran Bela Negara.
- b. Mewujudkan system politik demokratis dan situasi kondusif.

Penjelasan singkat mengenai misi tersebut di atas yaitu :

- Wawasan kebangsaan itu mencakup tiga aspek utama, yaitu memandang eksistensi bangsa, wawasan cara berfikir, bersikap dan bertingkah laku dan cara bangsa mengadaptasi dengan nilai-nilai luhur dan lingkungan kehidupan internasional.
- Ideologi yang dimaksud yaitu ideologi Pancasila, khususnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya antara lain :
 - 1) Gotong royong
 - 2) Persatuan dan kesatuan
 - 3) Tenggang rasa
 - 4) Menghormati orang lain
 - 5) Berprasangka baik dan sebagainya.
- Mengenai ketahanan bangsa, disini lebih ditekankan pada ketahanan di wilayah/Kab Purbalingga meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Dengan ketahanan di wilayah/Kab. Purbalingga yang mantap akan mendukung Ketahanan Nasional.
- Kesadaran bela negara yang merupakan tanggung jawab kita bersama dan bukan tanggung jawabnya TNI saja.

Adapun unsur-unsur bela negara :

 - 1) Cinta Tanah Air
 - 2) Kesadaran berbangsa dan bernegara
 - 3) Yakin akan kebenaran dan kesaktian Pancasila
 - 4) Rela berkorban untuk bangsa
 - 5) Memiliki kemampuan awal Bela Negara
- Sistem politik dimaksud sebagai suatu kesatuan, ada input – proses – output.

Unsur-unsur input :

- 1) Aspirasi masyarakat
- 2) Aspirasi pemerintah
- 3) Aspirasi dari Parpol
- 4) Aspirasi dari kelompok kepentingan dan sebagainya.

Proses :

Lembaga yang memproses input yang masuk yaitu DPRD Kab. Purbalingga. Peran Kesbangpol bersifat memfasilitasi Parpol yang ada di DPRD Kab. Purbalingga.

Unsur-unsur Output :

- 1) Peraturan Daerah
- 2) Berbagai kebijakan (usul, saran) dari DPRD yang ditujukan kepada Eksekutif/Bupati dan jajaran Pemda Purbalingga.

B. Jenis Pelayanan

Di Kantor Kesbangpol ada 2 (dua) jenis pelayanan yaitu :

- 1) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Orkemas.
- 2) Ijin/Rekomendasi Karya Tulis/Skripsi dan Penelitian.

C. Standar Pelayanan

Di Kantor Kesbangpol ada 2 (dua) jenis standar pelayanan yaitu :

- 1) Standar Pelayanan Publik Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Orkemas.
- 2) Standar Pelayanan Publik Ijin/Rekomendasi Karya Tulis/Skripsi dan Penelitian.

D. SOP

Di Kantor Kesbangpol Kab. Purbalingga ada 2 (dua) jenis SOP, yaitu :

- 1) Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Orkemas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.
- 2) Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Permohonan Ijin/Rekomendasi Karya Tulis/Skripsi dan Penelitian di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.

E. Maklumat Pelayanan

Maklumat pelayanan pada Kantor Kesbangpol yaitu :

Kami berupaya dengan sungguh-sungguh untuk :

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya sesuai Standar Pelayanan yang ada;

2. Menyiapkan petugas yang responsif, peduli, penuh perhatian, berdedikasi, dan siap melayani;
3. Menyediakan tempat pelayanan dan tempat parkir yang nyaman dan aman.

Dari maklumat tersebut di atas, jelas menginformasikan bahwa Kantor Kesbangpol berupaya secara maksimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

F. Motto Pelayanan

“Ikhlas Tersenyum”

Dari motto tersebut di atas, jelas bahwa petugas pelayanan, pada Kantor Kesbangpol dalam memberikan pelayanan dilandasi dengan nilai ibadah, tidak ada biaya (gratis) dengan semangat serta ramah/”tersenyum”.

G. Layanan Unggulan / Inovasi

Layanan unggulan pada Kantor Kesbangpol sementara saat ini yaitu pelayanan ijin/rekomendasi karya tulis/skripsi sampai minggu ketiga di bulan Juli 2013 jumlah layanan tercatat 651 buah.

H. SIM Pelayanan

Pada prinsipnya layanan di Kantor Kesbangpol menggunakan manajemen yang terbuka, dan informasi SOP, motto dan maklumat dapat dengan mudah dibaca/diketahui. Dan paling penting layanan kami cepat dan gratis.

I. Pengelolaan Pengaduan

Pengelolaan Pengaduan melalui kotak saran diatur dalam SK Kepala Kantor Kesbangpol Nomor 800.21/20 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2013.

III. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengkritisi dengan memberikan saran/masukan kepada Kantor Kesbangpol dengan menyampaikan surat lewat kotak saran. Pengalaman bahwa sampai saat ini, belum ada surat yang masuk ke kotak saran.

IV. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

Permasalahan yang ada di Kantor Kesbangpol Kab. Purbalingga antara lain :

- a) Peralatan khususnya mesin ketik sudah tua (rusak ringan) tapi masih bisa dipakai.
- b) SDM jumlah sangat terbatas khususnya pada seksi Sospol sehingga belum optimal.

Adapun solusinya yaitu dengan peningkatan etos kerja (semangat) yang tinggi pelayanan pada publik dapat berjalan baik dan cukup lancar.

V. PENUTUP

Demikianlah profil yang merupakan gambaran singkat Kantor Kesbangpol Kab. Purbalingga Tahun 2013, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, Juli 2013
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga

Drs. NUR HAMAM, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620614 198503 1 009